



## Denpasar Kantongi ✓ 70,9 Km Jalan Rusak

**Denpasar (Bali Post) -**

Denpasar sebagai ibu kota provinsi tidak bisa terlepas dari jalan rusak. Buktinya, sampai saat ini Denpasar masih mengantongi sekitar 70,9 kilometer jalan rusak. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaikinya.

Kabid Binamarga Dinas PU Denpasar I Wayan Dirgayasa, Minggu (8/11) kemarin mengatakan, untuk perbaikan jalan yang dalam kondisi rusak tersebut tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Pasalnya, perbaikan jalan secara total membutuhkan dana yang sangat banyak. Untuk perbaikan total jalan yang rusak di Denpasar, paling sedikit dibutuhkan anggaran sebesar Rp 496 miliar.

Dikatakan, total panjang jalan yang menjadi kewenangan Denpasar yakni 486,084 Km. Dari total panjang jalan tersebut, masih ada sepanjang 70,945 Km jalan yang rusak. Sementara jalan yang dalam kondisi baik sepanjang 268,972 Km, dan kondisi sedang sepanjang 146,168 Km. Jalan-jalan yang rusak tersebut tersebar di empat kecamatan di Denpasar.

"Untuk perbaikan kita sudah usulkan anggaran 2016 sebesar Rp 317 miliar, itu untuk perbaikan dengan skala prioritas. Sementara untuk perbaikan total butuh anggaran Rp 496

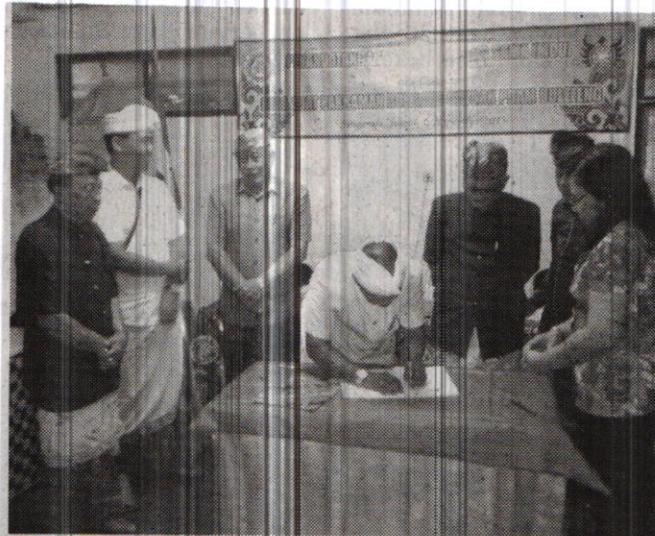
miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran Dinas PU hanya mendapat alokasi dana sebesar Rp 31 miliar saja. Dengan demikian kita memang tidak bisa melakukan perbaikan total," ujarnya. Dengan kondisi anggaran yang kurang mendukung tersebut, mengakibatkan penanganan jalan rusak di Denpasar lumayan lamban. Diakui Dirgayasa, setiap tahun dinas PU hanya bisa melakukan perbaikan jalan rusak sepanjang 15 Km. "Karena perbaikan jalan tidak bisa secara sekaligus, maka kita rancang perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut Dirgayasa mengatakan, Denpasar di tahun 2015 sebetulnya sangat beruntung karena sejumlah jalan Nasional yang awalnya dalam kondisi rusak mulai diperbaiki pemerintah pusat, seperti di jalan Sesetan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sutomo dan sejumlah jalan lainnya. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, kata dia, maka saat ini hampir tidak ada jalan Nasional di Denpasar yang sedang dalam kondisi rusak.

"Kondisi jalan nasional di Denpasar untuk saat ini total sepanjang 50,576 Km. Dari total tersebut, sepanjang 43,996 Km dalam kondisi baik, sedangkan sepanjang 6,580 Km dalam kondisi sedang," tambahnya. (kmb12)

Edisi : Senin, 9 November 2015

Hal : 7



BP/kmb34

**AIR MUMBUL - Kerja sama ditingkatkan PDAM dengan Desa Pakraman Buleleng dalam memanfaatkan mata air Mumbul. Kontribusi diberikan Rp 75 juta per tahun kepada Desa Pakraman Buleleng. Mata air sebelumnya tidak maksimal digunakan. Dengan kapasitas itu mampu memenuhi 3.500 pelanggan yang belum terlayani air PDAM.**

## PDAM Kontrak ✓ Mata Air Mumbul Kontribusi Rp 75 Juta/Tahun

Singaraja (Bali Post) -

Pemanfaatan air bersih penting dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PDAM Buleleng bersama Desa Pakraman Buleleng, meningkatkan pemberdayaan mata air Mumbul di lahan seluas 33 are di Banjar Adat Banjarjawa. Penandatanganan kerja sama langsung Klian Desa Pakraman Buleleng Nyoman Sutrisna dengan Direktur Utama PDAM Buleleng Made Lestariana itu disaksikan para *prajuru* dalam *paruman* desa.

Mata air Mumbul berada di lahan seluas 33 are di Banjar Adat Banjarjawa. PDAM Buleleng memanfaatkan mata air tersebut untuk kepentingan orang banyak. "Karena menyangkut orang banyak, mata air Mumbul itu dimanfaatkan selama 30 tahun ke depan melalui kontrak kerja sama. Nanti desa adat akan mendapatkan hibah kontribusi senilai Rp 75 juta per tahun. Pemberian kontribusi hasil dari pemanfaatan lahan berisi sumber mata air kepada desa pakraman," ujar Klian Desa Pakraman Buleleng Nyoman Sutrisna dikonfirmasi *Bali Post*, belum lama ini.

Ia mengatakan, setiap tahun sekali akan dilakukan peninjauan kembali berdasarkan kenaikan inflasi. Diharapkan sumber air tetap terjaga normal. Sumber mata air Mumbul ini memiliki kekuatan 40 liter per detik. Kapasitasnya mampu melayani hingga 3.500 pelanggan PDAM Buleleng. "Ini sebagai kepedulian Desa Pakraman Buleleng, memberi kontribusi kepada PDAM. Khususnya warga yang belum tersambung PDAM bisa cepat terlayani," katanya. (kmb34)

Edisi : Senin, 9 November 2015

Hal : 11



## Pemindahan Kabel SUTT Rp 15 Miliar Perlu Segera Pindah ✓ dari Kampung Barokah

Singaraja (Bali Post) -

Kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di PLTU Celukan Bawang yang melintang perlu dibenahi. Namun, sejauh ini masih belum terlihat aktivitas rencana pemindahan kabel dari titik tower utama di sebelah utara menuju silang ke arah barat, dan disambung ke titik tower di arah selatan. Padahal *deadline* oleh PLN dengan warga Kampung Barokah, Celukan Bawang, Gerokgak, tinggal tiga bulan ke depan, tepatnya harus tuntas 27 Februari 2016. Kabel SUTT itu masih kokoh melintang di atas pemukiman warga Kampung Barokah. Konon juga belum ada rencana pihak terkait segera memindahkan.

Edisi : Senin, 9 November 2015

Hal : 11



Sambungan ---

Waktu tiga bulan bukan waktu singkat memindahkan kabel SUTT. Saat ini terpasang dan hendak dibongkar untuk disilangkan ke arah barat dan disambung kembali ke selatan. Itu dilakukan untuk menghindari perlintasan di atas pemukiman Kampung Barokah. Tentu tidak sedikit biaya digelontorkan untuk menuntaskan proyek listrik terbesar di Bali yang memakai bahan bakar batu bara ini.

Tokoh masyarakat Muhammad Sadli, yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Celukan Bawang, mengatakan sampai sejauh ini belum ada rencana pemindahan tower dan kabel bertegangan 150 Kv tersebut. Keseriusan PLN memindahkan kabel itu dipertanyakan warga. Mereka khawatir sisa waktu tiga bulan tak sesuai perjanjian. "Kami belum melihat ada kegiatan pemindahan kabel SUTT. Warga meminta kesepakatan awal dipenuhi, dan tidak ada kompensasi karena kabel SUTT ini segera harus dipindahkan," pinta Sadli, Minggu (8/11) ke-

marin.

#### Langgar Perjanjian

Konon PLN itu terlalu lama bersikap. Terkesan malah melanggar perjanjian dengan warga Kampung Barokah. Sedianya warga memblokir pintu masuk menuju PLTU Celukan Bawang itu. Bahkan desa penyanggand lainnya digadang-gadang ikut bergerak membantu. "Harapan kami hanya supaya kabel SUTT dipindahkan secepatnya. Jangan menunggu mendekati kesepakatan 27 Februari tahun 2016," kata Sadli.

Biaya yang tinggi kata Sadli, diduga menjadi pemicu melambatnya proses pemindahan kabel SUTT di tahun kedua mendatang. PLN diperkirakan sedikitnya membutuhkan pemasangan tiga hingga empat tower penyambung kabel, yang berada di titik luar pemukiman warga. "Pemindahan kabel itu terkesan sulit dilakukan PLN. Diduga karena biayanya mencapai Rp 15 miliar. Kami dapat informasi kalau PLN Bali telah mengajukan proposal ke PLN

Pusat, untuk memindahkan kabel kini," ucapnya.

Persoalan kabel SUTT di Kampung Barokah ikut menjadi perhatian Kapolres Buleleng AKBP Harry Haryadi, kepada Kapolda Bali Irjen Pol Drs. Sugeng Priyanto, S.H., MA., usai melakukan kunjungan. Di mana pembentangan kabel SUTT harus dicarikan solusi terbaik. Jangan sampai menimbulkan keributan di masyarakat bawah.

Juru bicara PLN Bali I Wayan Redika, dikonfirmasi terpisah mengatakan, ia bersama tim telah turun ke lapangan. Senin (2/11) lalu, mensurvey lokasi perubahan lajur alur kabel SUTT. "Ya nanti hasilnya bagaimana di lapangan, itu kan masih panjang. Jadi rencana setahun pemindahan itu jelas, secara teknis kan sudah tidak mungkin. Karena itu semua perlu proses amdal, pembebasan tanah dan kajian lainnya, ini jelas membutuhkan waktu," ujar Redika. (kmb34)



Bali Post/kmb34

**KABEL - Tampak tower kabel utama PLTU Celukan Bawang melintang dari arah utara menuju ke selatan di atas permukiman warga Kampung Barokah, Desa Celukan Bawang, Minggu (8/11) kemarin.**



Perkecil Kerugian Petani Akibat Gagal Panen

## Anggota Dewan Usulkan Asuransi Pertanian

Gianyar (Bali Post) -

Gagal panen merupakan salah satu momok bagi petani, tak terkecuali di Kabupaten Gianyar. Kerugian akibat gagal panen menyebabkan petani kesulitan menghidupi keluarganya, hingga kehilangan gairah menggeluti sektor pertanian. Ke depan, masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Gianyar Ni Made Ratnadi, Minggu (8/11) kemarin.



Ni Made Ratnadi

Ratnadi mengungkapkan, masalah gagal panen disebabkan berbagai faktor. Masalah terjadi hampir setiap musim. Terlebih lagi tahun ini di mana musim kemarau berlangsung sangat lama dan petani juga dihadapkan pada masalah jaringan irigasi. "Kekeringan terjadi di berbagai daerah. Petani banyak yang merugi," katanya.

Menurut politisi PDI-P ini, pemerintah harus memikirkan solusi jangka panjang guna mengatasi berbagai persoalan yang mengancam eksistensi sektor pertanian. Salah satunya menyangkut kesejahteraan petani. Para petani harus mendapatkan perlindungan maksimal, agar mereka mampu bertahan di tengah berbagai ancaman terhadap sektor pertanian.

Salah satu upaya yang bisa diambil Pemkab Gianyar, kata Ratnadi, berupa program asuransi pertanian. Menurutnya, saat ini belum ada asuransi pertanian yang disubsidi pemerintah. Padahal program ini dinilai cukup strategis dalam kaitannya memberikan perlindungan bagi petani. "Memang sudah ada asuransi untuk petani, tapi preminya masih dibayarkan oleh petani sendiri. Ke depannya di Gianyar saya ingin ada program asuransi petani yang preminya disubsidi pemerintah, supaya beban petani lebih ringan," katanya.

Diungkapkannya dengan adanya asuransi pertanian yang disubsidi pemerintah, para petani bakal lebih bergairah lagi dalam menggarap lahannya. Jika selama ini mereka khawatir mengalami kerugian besar ketika gagal panen terjadi, maka dengan adanya asuransi tersebut, para petani bisa bernapas lebih lega karena kerugian bisa diminimalisir. "Takutnya mereka payah dan ragu lagi berinvestasi di pertanian. Efek sosialnya kalau sudah begini sangatlah besar. Bisa-bisa mereka memutuskan untuk menjual lahannya atau mengalih fungsikan untuk sektor lain seperti untuk akomodasi pariwisata," ujarnya.

Lebih lanjut Ratnadi berharap program perlindungan kepada sektor pertanian digencarkan oleh pemerintah. Pihaknya tidak ingin sektor pertanian terkesan dianak tirikan. Untuk itu, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk melakukan kajian terkait asuransi pertanian.

"Kami akan koordinasikan. Apakah APBD mencukupi untuk membiayai program itu. Itu perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Tapi keinginan saya supaya program semacam ini bisa digarap segera, supaya tidak sampai jadi komoditas politik saat pilkada-pilkada di masa mendatang," tegasnya. (kmb25)

Edisi : Senin, 9 November 2015

Hal : 9



## Transportasi Pelajar

# Pemkab Siapkan Tujuh Bus

Gianyar (Bali Post) -

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) Kabupaten Gianyar tengah fokus menggarap sistem transportasi bagi pelajar yang dinamakan Trans Harmoni. Sebagai pendukung sistem transportasi tersebut, saat ini dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, khususnya bus dan halte penunjang.

Kadishubinfokom Gianyar Cokorda Gde Agusnawa, Minggu (8/11) kemarin mengungkapkan, untuk tahap awal pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bus dan halte di APBD Perubahan 2015. Khusus bus, pemerintah memasang anggaran untuk pengadaan sebanyak tujuh unit bus. "Sekarang masih proses tender. Masing-masing bus nilainya sekitar Rp 600 juta," katanya.

Agusnawa mengatakan, sesuai instruksi bupati, ketujuh unit bus tersebut akan disebar di masing-masing kecamatan.

Jadi, tiap kecamatan akan dilayani satu unit bus. Guna mendukung operasional bus sekolah, pihaknya juga akan mensinergikannya dengan angkutan umum lainnya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok.

"Untuk pengaturan operasionalnya kami sudah ada kajian. Nanti tinggal kami koordinasikan dengan pihak Organda, terutama menyangkut sinergi dengan angkutan umum lain," katanya.

Sementara untuk halte, Agusnawa tidak menyebut-

jalankan sistem transportasi tersebut. "Nanti saja kalau sudah disetujui," katanya.

Lebih lanjut diungkapkannya, Trans Harmoni bertujuan memberikan kenyamanan

bagi masyarakat, khususnya pelajar dalam menggunakan transportasi umum. Dalam merealisasikannya, tidaklah mudah. Berbagai kendala

termasuk pro dan kontra di masyarakat terhadap sistem ini selalu akan bermunculan.

Menurutnya, untuk membangun sistem transportasi publik yang aman dan nyaman tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dalam pengembangannya pun kemungkinan ada yang bakal merasa keberatan. "Yang namanya perubahan itu kan tidak mudah, apalagi mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, Kita akan coba dulu. Di awal pasti akan sulit. Tapi mudah-mudahan dalam tiga bulan, setahun pengoperasiannya bisa mendapat tempat di hati masyarakat. Jadi kita sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk itu," ungkapnya. (kmb25)



Bali Post/ded

Cokorda Gde Agusnawa

kan secara rinci jumlah pengadaannya. Namun dia memastikan halte akan ditempatkan di dekat sekolah atau di tempat umum lainnya yang strategis sebagai perlintasan bus.

Dijelaskannya, Trans Harmoni bakal menjadi sistem angkutan gratis bagi pelajar. Pemkab Gianyar akan memberikan subsidi untuk pengoperasiannya. Ditargetkan, sistem transportasi ini akan mulai beroperasi pada 2016 mendatang. Agusnawa sendiri belum mau membeberkan mengenai anggaran yang diperlukan untuk men-

Edisi : Senin, 9 November 2015

Hal : 9